

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multicultural yang memiliki banyak suku, ras, dan etnis yang berbeda beda dan hidup saling berdampingan. Di tengah keberagaman tersebut. Setiap individu memiliki berbagai identitas, termasuk identitas nasional, etnis, agama, budaya, gender, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, identitas ini dapat berdampak pada pandangan politik seseorang, termasuk dalam penggunaan identitas yang pada akhirnya akan menghasilkan perubahan sosial. Keterkaitan antara perubahan sosial dan identitas menyebabkan pertentangan tersembunyi bahkan terang terangan dapat terjadi di kalangan masyarakat. Pertentangan antara perubahan sosial dan identitas tersebut dapat melahirkan konflik antar identitas di ranah politik(Wingarta et al., 2022).

Politik identitas tidaklah merupakan fenomena baru. Hampir setiap kali pemilihan umum, politik identitas sering kali dimanipulasi oleh sekelompok individu demi kepentingan mereka. Di Amerika, sebagai contoh, politik identitas mencapai puncaknya dalam perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Sebagai ilustrasi, gerakan Black Lives Matter digunakan sebagai alat dukungan untuk memenangkan suara dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020 oleh Joe Biden (Larsson, 2023). Bukan hanya Biden, lawannya pada saat itu, Donald Trump, juga sering memanfaatkan isu identitas ketika pertama kali memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2016 dan dalam pencalonannya kembali pada tahun 2020. Di Indonesia, contoh lainnya dapat ditemukan dalam pemilihan kepala daerah

(pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017, yang menunjukkan sejauh mana politik identitas dapat berdampak, bahkan membawa dampaknya hingga pemilihan presiden tahun 2019.

(Salasah, 2022) Mengacu pada laporan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia tahun 2019 yang berjudul "Mengelola Politik Identitas dalam Pemilu 2019", terdapat tiga tren kampanye politik identitas yang terjadi pada pemilihan umum tersebut. Pertama, narasi politik identitas, terutama yang berkaitan dengan agama, yang menjadi fokus pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sebagian besar merupakan hasil dari pertarungan dalam pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Kedua, politisasi isu identitas semakin meningkat karena Pilpres 2019 melibatkan calon presiden yang sama dengan Pilpres 2014. Ketiga, isu identitas dijadikan sebagai strategi elektoral, terutama untuk meraih dukungan dalam kampanye digital dan perang siber antara kedua kubu. Caranya dilakukan dengan merancang, memperbesar, dan menyebarkan isu identitas tersebut di dunia digital sehingga isu tersebut menjadi dominan dalam narasi (Assidiq et al., 2021; Putri et al., 2022).

Tren serupa kembali muncul menjelang kontestasi pilpres 2024, dan pandangan ini disepakati oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, pengamat, dan akademisi. Sebagai contoh, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyatakan dalam diskusi publik LPI dengan tema "Mainan Oligarki di Balik Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024" bahwa narasi politik identitas dipromosikan dan diproduksi oleh para oligarki (Syaiful Hakim, 2022). Selanjutnya, Presiden Jokowi Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat,

pada 17 April 2023, menyampaikan bahwa politik identitas perlu diwaspadai menjelang Pemilu 2024 agar masyarakat tidak menjadi korban politik, dan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan menjadi lebih kondusif, aman, dan nyaman (Jawa Pos, 2023).

Politik Identitas merupakan alat politik yang dimanfaatkan oleh kelompok elit untuk mencapai tujuan tertentu, baik sebagai bentuk perlawanan, penonjolan identitas kelompok, atau sebagai kekuatan politik, yang dapat mendukung eksistensi atau memperkuat posisi politik dalam konteks pemilihan umum. Politik identitas dapat membentuk pandangan masyarakat bahwa individu yang tidak memiliki identitas serupa dengan kelompok mayoritas dianggap tidak layak memimpin. Akibatnya, kelompok minoritas berisiko kehilangan hak yang setara dalam urusan pemerintahan, terutama dalam konteks pemilihan dan penentuan kebijakan(Syarwi, 2022).

Hal itu menjadi masalah ketika isu-isu tersebut mencapai calon pemilih yang kurang berpengetahuan dan mudah dipengaruhi. Kemungkinan besar, calon dari kaum minoritas dapat kehilangan dukungan publik, meskipun karier dan prestasi mereka sudah cukup memadai untuk memimpin atau mewakili rakyat. Politik identitas juga berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara dengan pluralisme masyarakat, Indonesia menganut sistem demokrasi. Jika populisme dalam politik identitas semakin meningkat, hal itu dapat mengancam keadilan sosial, kesetaraan hak bagi seluruh warga Indonesia, bahkan kebebasan individu dan kelompok. Penggunaan politik identitas berbasis agama dalam kampanye politik juga dapat memperdalam kesenjangan antar kelompok umat

beragama di Indonesia. Pengaruh kuat dari kelompok agama radikal di Indonesia dapat secara tidak langsung merugikan pemeluk agama yang berbeda. Minoritas agama mungkin merasa terdiskriminasi, yang dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama.

Banyak aspek yang umumnya menjadi fokus penelitian dalam politik identitas melibatkan gender, agama, bahasa, serta ras dan etnis (Widyawati, 2021). Keberadaan faktor-faktor tersebut menunjukkan perbedaan yang nyata dan sering kali menjadi landasan yang sangat jelas, yang pada gilirannya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan atau wacana dominan. Meskipun demikian, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada identitas dalam konteks politik nasional. Politik nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional).

Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, peranan iklan produk politik menjadi sangat penting. Mereka memanfaatkan identitas sebagai sarana untuk memperoleh dukungan suara, yang merupakan syarat penting untuk meraih jabatan politik. Penggunaan identitas sebagai strategi ini sangat praktis karena identitas memiliki segmen pasar yang khusus. Faktor-faktor seperti status sosial dan ekonomi, tempat tinggal, dan agama diyakini dapat memengaruhi preferensi partai politik atau kandidat bagi pemilih. Konsekuensi dari pemanfaatan identitas dalam konteks politik adalah timbulnya pertarungan identitas (Rabbani et al., 2021). Tanda-tanda identitas yang terdapat dalam iklan politik digunakan untuk

memengaruhi keputusan politik pemilih, dengan target utama adalah pemilih yang memiliki identitas serupa dengan tanda identitas yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Iklan politik berperan sebagai alat politik baru dari partai politik atau kandidatnya, bertujuan untuk memperkuat eksistensi partai politik dan menciptakan pengaruh yang diperlukan untuk meraih dukungan terhadap partai politik dan kandidat politik yang mereka dukung.

Dalam situasi kontestasi pemilu 2019 merupakan hasil dari polarisasi politik yang tajam dan politisasi masalah identitas selama pemilihan presiden 2019. Dengan kata lain, ada semacam dinamika polarisasi dan kontestasi yang terus berlangsung. Desain pemilihan yang menetapkan batas presidential juga meningkatkan polarisasi politik karena hanya ada dua peluang untuk muncul sebagai kandidat presiden. Selain itu, terdapat fenomena yang terjadi dalam industri konsultan politik, pengaruh eksternal, dan orang-orang yang terlibat dalam kampanye online paslon. Selain memainkan peran penting dalam menentukan produksi isu dan menyebarkan konten kampanye di platform digital, fungsi mereka juga menyebabkan perpecahan politik dan politisasi masalah identitas. Dapat dilihat dengan seksama bagaimana cyber army dari masing-masing kubu terus mengulangi dan mengolok-olok setiap masalah non-programatik. Sebagai sumber informasi publik, media cenderung memprioritaskan isu-isu non-program dalam pemberitaan mereka, karena keterlambatan Pemilu 2019 membuat isu-isu pilpres menjadi lebih penting daripada Pileg di DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kota.

Pada kondisi lain, ditemukan juga dari tiga wilayah menunjukkan kondisi tambahan. Dalam kampanye caleg dan parpol di daerah, masalah lokal diabaikan

oleh cerita kampanye nasional yang dominan. TKD dan BPD biasanya hanya mengirimkan konten dari pusat, yang membuat framing masalah tidak sesuai dengan konteks lokal dan hubungan politik (Kolne & Festianto, 2018). Karena pergeseran fokus parpol antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, parpol dan caleg di tingkat lokal menghadapi kesulitan dalam mengelola masalah kampanye pemilihan presiden sesuai dengan karakteristik pemilih.

Akibatnya, menjelang Pemilu Presiden 2024, sudah mulai terlihat bahwa kepetingan politik dapat dilakukan dengan berbagai macam aksi kampanye. Akibatnya, banyak tokoh politik yang menggunakan ulama yang bisa dijadikan tokoh politik untuk mendulang suara melalui isu-isu SARA. Contohnya yaitu Anies Baswedan sebagai kandidat Calon Presiden 2024 yang secara terang terangan menggunakan identitas mereka sebagai alat untuk mendapat dukungan suara.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana terbentuknya politik identitas dalam lingkup politik nasional menjelang Pemilu Presiden 2024. dalam hal ini penulis akan meneliti pada ruang lingkup identitas pada politik nasional. Politik nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kandidat calon Presiden 2024, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Media online yang diambil yaitu Detik.com, Kompas.com, dan CNN. Ketiga media tersebut merupakan sumber media terbesar di Indonesia. Selain itu, ketiga media tersebut adalah yang media

massa online yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia (Cindy Mutiara Annur, 2023).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Politik Identitas Calon Presiden yang diusung partai Gerindra, Pdp, dan Nasdem menjelang Pemilu Presiden 2024 di CNN, Detik.com, dan Kompas.com?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan Politik Identitas Calon Presiden yang diusung partai Gerindra, Pdp, dan Nasdem menjelang Pemilu Presiden 2024 di CNN, Detik.com, dan Kompas.com.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai terbentuknya politik identitas dalam lingkup politik nasional. Serta, juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai hasil pembelajaran dalam menganalisis terbentuknya politik identitas dalam lingkup Politik Nasional menjelang Pemilu Presiden 2024

2. Bagi peneliti selanjutnya

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan panduan untuk pengembangan pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang politik identitas dalam konteks nasional menjelang Pemilu Presiden 2024.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan studi dari (Faraidiany Et Al., 2019), menjelaskan bahwa penggunaan identitas untuk menaikkan dukungan masih dilakukan oleh para kandidat. Para kandidat sengaja memasukkan unsur etnis dan agama dalam bentuk proximitas pada saat kampanye. Studi dari (Paillin Rumbi, 2019), memperlihatkan bahwa politik identitas dimanfaatkan untuk kepentingan oknum kandidat pada ranah politik yang berhubungan dengan system pemerintahan. Hal tersebut dinilai dapat memicu adanya konflik internal. (Wingarta Et Al., 2022) dalam studinya menjelaskan bahwa politik identitas memiliki pengaruh negative dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya edukasi mengenai politik agar masyarakat dapat memiliki ilmu yang rasional dan ikut berpartisipasi untuk demokrasi. (Imron Et Al., 2021), menjelaskan bahwa perlu adanya penguatan politik dan identitas mengenai kerakyatan di Indonesia. Selain itu perlu adanya edukasi dari semua tokoh politik dan agama dalam hal etnis, kepercayaan, dan ras.

Studi dari (Hamdani, 2020) memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu pada Sawahlunto 2018, walaupun terdapat kesamaan etnis dari dua kandidat, namun tidak menimbulkan konstelasi politik identitas. (Hamdanny & Mukhtar, 2021)

dalam studinya menjelaskan bahwa politik identitas lebih merujuk pada Islam, dikarenakan umat islam secara kolektif melakukan berbagai upaya termasuk koalisi untuk memperjuangkan keadilan sosial melalui system politik. Berdasarkan studi dari (Sabarudin, 2021), memperlihatkan bahwa terdapat organisasi yang secara massif menggunakan jaringan politik dalam media online untuk mempengaruhi preferensi pilihan politik dalam Pemilu DKI Jakarta. (Stai Et Al., 2020) dalam studinya menjelaskan bahwa, dalam berbagai konflik yang terjadi di Minangkabau, terbukti terdapat peranan dari etnis. Hal tersebut dipicu oleh munculnya konflik kebangkitan islam dalam kerangka identitas kultural.

(Dauly Et Al., 2019) dalam studinya menunjukkan bahwa proses politik identitas oleh dua oknum kelompok berbeda dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan tokoh agama di berbagai daerah. Pola yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Berdasarkan studi dari (Wantona, 2018) menjelaskan bahwa dalam melakukan praktik politik identitas, actor politik melakukan propaganda istilah Ukem-Toa. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya campur tangan sejarah, budaya dan agama. (Widyawati, 2021) dalam studinya menjelaskan bahwa, terjadinya konflik dalam pilkada DKI Jakarta disebabkan oleh bangkitnya politik identitas dalam arena pemilu. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan warga DKI Jakarta, namun juga seluruh warga Indonesia. Menurut (Rabbani Et Al., 2021) dalam studinya menunjukkan bahwa Gerakan 212 merupakan symbol dari bangkitnya politik identitas dan tendensi politik.

(Reka Prasetia, 2019) dalam studinya menjelaskan bahwa hal pertama yang dilakukan dalam melakukan penanganan terkait politik identitas yaitu melalui media sosial. Karena indikator keberhasilan Pemilu yaitu bebas dari eksploitasi politik identitas. Studi dari (Wulan Dhani, 2019) memperlihatkan bahwa perpecahan kelompok masyarakat utamanya disebabkan oleh adanya politik identitas dalam kampanye. (Kolne & Festianto, 2018) dalam studinya menjelaskan bahwa terdapat kebebasan untuk masing masing anggota anggota komunitas etnis flores timur untuk menentukan pilihan dan dukungan terhadap tokoh politik dalam Pilkada 2015 di Timor Tengah. (Herdiana Et Al., 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa politik identitas juga dilakukan di tingkat desa, dengan cara para calon kepala desa dilihat melalui keturunan atau keluarga pesantren dan berkedudukan sebagai tokoh islam.

Berdasarkan studi dari (Mau Kau Et Al., 2020) menjelaskan bahwa tidak adanya pengakuan identitas terhadap berbagai ras, agama, etnis, dan suku sering kali menimbulkan konflik sosial baik antar pribadi maupun antar kelompok. (Nasrudin Et Al., 2018) dalam studinya memperlihatkan bahwa proses demokrasi pada kasus Pilkada DKI Jakarta dipengaruhi oleh orientasi politik identitas dan representasi politik. (Sujito, 2022) dalam studinya menjelaskan bahwa dalam konflik politik identitas, Pancasila telah dijadikan sebagai taruhan electoral dalam hal mendefinisikan identitas kebangsaan. Berdasarkan studi dari (Syarwi, 2022) memperlihatkan bahwa, politik identitas perlu dihilangkan, hal ini untuk mencegah pembelahan dan perpecahan sosial yang semakin hari semakin tajam di masyarakat.

Berdasarkan tinjauan Pustaka diatas, studi yang diambil tidak jauh pada pembahasan mengenai kasus politik identitas yang terjadi di Pemilu Daerah. Belum ada yang membahas mengenai bagaimana terbentuknya politik identitas pada pemilu nasional. Penelitian ini menjadi menarik karena akan membahas mengenai bagaimana terbentuknya politik identitas dalam lingkup politik nasional menjelang Pemilu Presiden 2024. Dalam hal ini penulis akan meneliti pada ruang lingkup identitas pada politik nasional.

F. Kerangka Teori

1. Politik Identitas

Dalam perkembangannya, politik identitas sering muncul dalam ranah wacana politik kebudayaan. Dalam disiplin ilmu politik, ini merupakan konsep baru yang dikenal sebagai biopolitik dan politik perbedaan, yang secara dasar menekankan pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari variasi tubuh. Menurut Buchari (2014), politik identitas secara teoritis dianggap sebagai karakteristik hidup yang ada di setiap etnis, dengan eksistensinya bersifat laten dan potensial, dan bisa muncul sebagai kekuatan politik yang dominan sewaktu-waktu. Secara empiris, politik identitas menjadi aktualisasi dari partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya yang melekat dalam masyarakat setempat, mengalami proses internalisasi terus-menerus dalam kebudayaan masyarakatnya melalui interaksi yang terus berlangsung. Castells (2002) dalam bukunya *“The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume II: The Power of Identity”* menjelaskan bahwa Fokus penelitian dalam konteks masyarakat

jaringan berpusat pada identitas kolektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam masyarakat jaringan, makna individu melintasi batasan ruang dan waktu, serta terhubung dalam suatu jaringan pemahaman atau jenis identitas, khususnya di dunia maya. Castells mengelompokkan identitas ke dalam tiga bentuk, yaitu legitimizing identity, resistance identity, dan project identity.

1. Identitas Legitimasi

Identitas ini diperkenalkan oleh lembaga yang memiliki kekuatan dominan dalam masyarakat. Tindakan ini dilakukan untuk memperluas dan memberikan pembenaran rasional terhadap dominasi mereka terhadap aktor sosial. Identitas berkembang sebagai ciri khas ketika suatu lembaga yang dominan mentransformasikan pemikiran mereka menjadi bentuk dominasi yang dirasionalisasi. Identitas inilah yang kemudian membentuk masyarakat sipil yang terdiri dari elemen-elemen lembaga.

2. Identitas Perlawanan

Tipe identitas ini dipegang oleh individu-individu yang mendapat posisinya melalui perlawanan terhadap logika berpikir yang dominan, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mempertahankan identitas sebagai bentuk perlawanan. Dalam konteks ini, identitas ini umumnya muncul dari mereka yang berada dalam posisi atau kondisi yang lemah akibat stigmatisasi

oleh pihak yang mendominasi. Identitas ini biasanya dimanfaatkan lebih pada aspek politik identitas. Selanjutnya, dari identitas tersebut, akan berdampak pada pembentukan suatu komunitas, sehingga melalui perlawanan kolektif terhadap tekanan yang ada, komunitas tersebut dapat menjadi dasar bagi pembentukan jaringan yang kuat dan kokoh.

3. Identitas Proyek

Project identity merupakan hasil dari konstruksi identitas yang terjadi ketika aktor-aktor sosial, melalui berbagai aspek budaya, menciptakan identitas baru yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat. Melalui cara ini, mereka berusaha untuk mentransformasi semua struktur yang ada. Saat aktor-aktor ini membangun identitas dan mengubah struktur sosial, identitas juga terkait dengan posisi kelompok sosial, terutama dalam konteks organisasi. Kelompok identitas juga merupakan asosiasi yang signifikan secara politik yang menarik individu karena rasa identitas bersama. Kelompok identitas merujuk pada kelompok terorganisasi yang memiliki harapan sosial dan menciptakan perilaku kolektif. Pembentukan kelompok identitas juga disebabkan oleh partisipasi anggota, dukungan kelompok, dan identifikasi.

Klaus Von Beyme (sebagaimana yang disebutkan dalam Abdillah, 2002:14) menyatakan bahwa terdapat tiga ciri khas dalam politik identitas.

Pada dasarnya, gerakan politik identitas berfokus pada upaya membangun kembali "narasi besar" yang pada prinsipnya telah ditolak, dan membentuk suatu teori untuk mengontrol faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan mendasar dalam realitas kehidupan. Dalam gerakan politik identitas, terdapat dasar untuk membangun sistem apartheid terbalik. Apabila pencapaian kekuasaan dan pembagian kekuasaan tidak dapat terwujud sebagai tujuan gerakan, strategi pemisahan diri dan pengecualian diri dianggap sebagai solusi alternatif. Klaus Von Beyme mengatakan ada tiga karakteristik yang terdapat pada politik Identitas yaitu;

1. Gerakan politik identitas pada dasarnya melibatkan upaya membangun kembali "narasi besar" dengan menolak prinsip-prinsip yang ada dan menciptakan suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai dasar perbedaan-perbedaan;
2. Dalam konteks gerakan politik identitas, cenderung terjadi pembentukan sistem apartheid terbalik. Ketika mencapai kekuasaan menjadi sulit dan tujuan pembagian kekuasaan tidak tercapai, tindakan pemisahan diri dan pengecualian dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi situasi tersebut;
3. Kelemahan dari gerakan politik identitas terlihat dalam upaya untuk membentuk kelompok-kelompok khusus. Sebagai contoh, dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta, muncul sentimen politik identitas

yang kuat, di mana pribumi secara spesifik menolak non-pribumi. Hal ini terjadi ketika upaya mencapai kekuasaan terkendala dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai salah satu tujuan gerakan, sehingga tindakan pemisahan diri dan pengecualian dianggap sebagai solusi untuk menggulingkan pasangan calon lain.

2. Ruang Publik (Public Sphere)

Menurut Habermas (1974), ruang publik adalah suatu zona dimana orang-orang privat berkumpul untuk menciptakan suatu kepentingan publik dan mengatasi permasalahan publik. Ruang publik tersedia untuk semua orang dan tidak berfokus pada otoritas dalam bentuk perintah yang terbagi, namun justru melemahkan cita-cita yang menjadi landasan aturan tersebut. Agar bebas dari kendali pemerintah, ruang publik harus berisi masyarakat swasta itu sendiri, yang memungkinkan opini publik berkembang guna menciptakan konsensus sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Pengertian tersebut mengandung makna adanya pengawasan masyarakat melalui ruang publik, seperti forum diskusi di media sosial melalui fanpage dimana pemerintah tidak ikut campur di dalamnya.

Habermas (1974) dalam karyanya "*The Structural Transformation of the Public Sphere*", Menggambarkan *öffentlichkeit* sebagai "bidang kehidupan sosial kita di mana sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk," dan di mana "akses dijamin bagi semua warga negara," Habermas menciptakan ruang ideal konseptual di mana semua warga negara

akan mampu. mengumpulkan dan mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam “cara yang tidak terbatas”. Meskipun secara teoritis tidak berbahaya, namun dalam praktiknya ruang seperti itu tidak pernah ada karena masyarakat yang benar-benar adil belum terbentuk.

Selain untuk mendiskusikan hal hal tertentu, ruang public juga dapat digunakan sebagai wadah untuk melakukan mediasi antara urusan sosial dan individu. Hal tersebut bertujuan agar dalam mengatasi suatu masalah dan opini privat, diharapkan dapat memperoleh kesepakatan dari berbagai pihak. Hal yang dapat dilakukan saat mediasi di ruang public yaitu masyarakat dapat mendiskusikan masalah masalah yang sedang terjadi di public sehingga opini public dari masyarakat dapat mendatangkan perubahan.

1) Ciri Ruang Publik

Habermas menjelaskan beberapa ciri ciri ruang public, yaitu:

- a. Bebas: Ruang publik diartikan sebagai area tanpa sensor dan dominasi, di mana semua individu, tanpa kecuali, dapat mengaksesnya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Dalam dunia maya, setiap orang memiliki kebebasan untuk masuk tanpa adanya sensor atau dominasi, memungkinkan mereka untuk mengirim informasi atas nama siapa pun dan dari mana pun

tanpa harus memihak pada suatu posisi moral tertentu.

- b. Terbuka: Opini Publik: Informasi dalam ruang publik dianggap sebagai elemen kunci. Dalam ruang publik, individu memiliki kebebasan untuk secara jelas menyampaikan pendapat mereka. Informasi yang ada dalam dunia maya saling terhubung, memungkinkan setiap individu untuk melompat dari satu teks ke teks lainnya untuk mendapatkan informasi..
- c. Ruang publik merupakan ruang terciptanya opini nonpemerintahan yang menjadi ajang pembentukan pendapat tiap individu di luar kendali pemerintahan.
- d. Setara: Ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi individu dalam kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan negara. Setiap individu yang ada di dalam ruang publik memiliki kedudukan yang setara dalam berbicara.
- e. Independen: Ruang publik berfungsi sebagai sebuah wadah yang independent dari pemerintah dan bebas dari aturan otoritas negara. Masyarakat

bebas berpendapat melalui debat rasional tanpa diarahkan demi kepentingan tertentu sehingga pada akhirnya terciptalah opini publik. dalam dunia maya sebagai wadah informasi dapat dengan cepat tersebar ke setiap individu sehingga setiap individu dapat ikut serta dalam mendiskusikan banyak perkara sekaligus tanpa diarahkan demi kepentingan tertentu.

3. Pemilu

Tricahyo (2009:6) memberikan definisi Pemilihan Umum sebagai "instrumen universal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang bertujuan membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat." Dalam pengertian ini, pemilihan umum dianggap sebagai alat untuk mengaktualisasikan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, dan sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat. Di Indonesia, partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara diwujudkan melalui pemilihan umum. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui perwakilan rakyat yang menduduki parlemen, dengan menerapkan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat dipilih oleh rakyat secara berkala melalui Pemilu agar dapat membela aspirasi rakyat.

Soedarsono (2005) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan "syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis." Dalam penjelasannya, pemilihan umum dianggap sebagai persyaratan minimal untuk mendukung sistem demokrasi dan diadakan dengan maksud untuk memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, serta presiden guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil-wakil rakyat yang menduduki lembaga perwakilan. Selain itu, kedaulatan rakyat dalam pengelolaan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan kepala daerah yang juga dipilih langsung. Semua anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah, karena dipilih langsung, dianggap sebagai wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Pentingnya kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan menekankan bahwa wakil rakyat tersebut harus ditentukan oleh rakyat sendiri melalui pemilihan umum.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 macam Pemilu, yaitu:

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden diadakan setiap 5 tahun sekali dengan maksud untuk memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk memimpin negara. Tujuan utamanya adalah memajukan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Presiden dan wakil presiden memegang peran paling penting

dalam negara demokrasi, dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat luas. Namun, pemilihan mereka bergantung pada keinginan dan suara rakyat. Sebelum tahun 2004, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang menentukan presiden dan wakil presiden. Namun, sistem pemilihan berubah karena kedua partai calon presiden tidak memperoleh suara lebih dari 50 persen. Dan Seseorang hanya diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden maksimal dua kali. Pembatasan ini diterapkan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berkepanjangan.

2) Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, proses pemilihan umum untuk anggota legislatif Indonesia telah dimulai sejak tahun 1955. Di Indonesia, ada tiga lembaga legislatif yang harus mengadakan pemilihan umum untuk mengganti anggotanya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan anggota legislatif tidak hanya berlangsung secara nasional, tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, terdapat berbagai peraturan dan syarat yang harus dipatuhi. Hal ini

disesuaikan dengan peran dan cakupan tugas yang berbeda antara DPR, DPD, dan DPRD. Calon anggota DPR dan DPRD harus menjadi anggota partai politik dan tidak diizinkan untuk mencalonkan diri secara independen. Partai yang diwakili juga harus merupakan partai yang sah dan memiliki kantor fisik. Sementara itu, untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, individu diperbolehkan mencalonkan diri secara independen, asalkan tidak memegang jabatan ganda saat mencalonkan diri.

3) Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jenis pemilihan umum yang paling lokal, berbeda dengan pemilihan presiden dan anggota legislatif yang memiliki cakupan lebih luas. Proses ini baru dimulai sejak tahun 2004, serupa dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengaturnya tata cara pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diadakan secara lokal karena pemilihan ini ditujukan untuk daerah-daerah tertentu. Sebagai contoh, calon pemimpin di Kota Yogyakarta hanya dapat dipilih oleh penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berasal dari Yogyakarta. Hal ini

bertujuan agar hak pilih warga yang akan dipimpin tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh orang-orang dari daerah lain. Sebelum tahun 2008, peserta pemilihan kepala daerah hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai. Namun, seiring berjalannya waktu, individu juga diizinkan mencalonkan diri secara independen, asalkan mereka memiliki hubungan erat dengan daerah tersebut atau merupakan tokoh yang dikenal di komunitas tempat mereka mencalonkan diri.

4. Partai Politik

1) Definisi Partai Politik

Menurut Budiardjo, partai politik dapat diartikan sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang serupa. Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta meraih posisi politik, umumnya dengan cara konstitusional untuk mewujudkan programnya. Pandangan Giovanni Sartori tentang partai politik adalah sebuah kelompok politik yang aktif dalam pemilihan umum dan mampu menempatkan calon-calonnya dalam jabatan politik melalui proses tersebut.

Edmund Burke (2005) menggambarkan partai politik sebagai lembaga yang terdiri dari individu yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berlandaskan pada prinsip-prinsip dan kesepakatan yang mereka

capai. Lapalombara dan Anderson (1992) mendefinisikan partai politik sebagai setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi, menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah setempat, hadir selama pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik yang bersifat bebas maupun tidak bebas.

Menurut Sigmund Neuman (1963), partai politik merupakan suatu organisasi yang terlibat dalam aktivitas politik dengan tujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan memperoleh dukungan dari masyarakat melalui persaingan dengan kelompok atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Sementara itu, menurut R.H. Soltau (1961:199), partai politik didefinisikan sebagai sekelompok warga negara yang terorganisir dan berfungsi sebagai kesatuan politik. Mereka menggunakan kekuasaan mereka dalam pemilihan dan pengambilalihan pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan umum mereka.

Menurut Carl J. Friedrich (1967:415) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun matril.

2) Fungsi Partai Politik

a. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat, mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pihak berkuasa, dan sebaliknya, mengirimkan informasi dari pihak berkuasa kepada masyarakat. Data dari masyarakat, seperti pendapat dan aspirasi, diatur dan diselaraskan agar dapat diteruskan kepada pembuat kebijakan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah, seperti rencana, program, atau kebijakan, disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai alat komunikasi politik bervariasi di berbagai negara, terutama terkait dengan pandangan atau ideologi yang mereka anut. Misalnya, di negara yang menganut paham demokrasi, komunikasi politik umumnya bersifat dua arah, sementara di negara yang menganut paham otoriter, komunikasi politik cenderung hanya satu arah, yaitu dari pihak berkuasa kepada masyarakat.

b. Sebagai Sarana Artikulasi dan Aghregasi kepentingan

Partai politik memiliki peran dalam mengalirkan berbagai pendapat, aspirasi, atau tuntutan dari masyarakat.

Proses pengelolaan, perumusan, dan penyaluran pendapat, aspirasi, atau tuntutan tersebut kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan dikenal sebagai artikulasi kepentingan. Dalam praktiknya, artikulasi kepentingan tidak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga dapat dijalankan oleh kelompok kepentingan. Proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat disebut agregasi kepentingan, yang tidak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

c. Sarana Sosialisasi Politik

Selain menyematkan ideologi partai kepada para pendukungnya, partai politik juga perlu menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mengedukasi masyarakatnya agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan proses ini dikenal sebagai sosialisasi politik. Umumnya, kegiatan ini diadakan dalam bentuk memberikan pemahaman politik melalui pertemuan atau ceramah politik. Di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan, fungsi utama dari sosialisasi politik seringkali ditujukan pada upaya memperkuat integrasi nasional, khususnya dalam masyarakat yang memiliki keberagaman.

d. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah, peranan partai politik melibatkan pengembangan program politik dan manage opini publik. Partai politik berfungsi sebagai organisasi yang secara berkesinambungan menghasilkan program politik. Program politik, dalam konteks ini, mencakup semua program yang terkait dengan agenda kerja partai, termasuk isu-isu nasional baik secara langsung maupun tidak langsung, sejalan dengan dinamika persaingan dalam upaya memperoleh pengaruh dan perhatian publik.

Program politik tidak hanya dihasilkan dan dikomunikasikan menjelang pemilu, seperti yang umumnya dilakukan oleh organisasi politik. Partai politik juga secara terus-menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya komunikasi program politik kepada publik menjadi suatu keharusan. Faktor yang membedakan antara satu partai politik dengan partai lainnya adalah penggunaan ideologi untuk menganalisis dan merumuskan program politik. Setiap partai politik memiliki sistem ideologi yang unik, sehingga program politik yang dihasilkan pun menjadi berbeda satu sama lain.

5. Media Massa Online

1) Definisi Media Massa Online

Media massa merupakan alat penyebaran informasi kepada khalayak luas. Bungin (2008) mendefinisikan media massa sebagai sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara serentak dan mudah diakses. Dengan kata lain, media massa adalah sarana untuk menyebarkan berbagai jenis konten seperti informasi, opini, komentar, hiburan, dan lain-lain. Cangara (2016) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Komunikasi” menjelaskan bahwa media adalah alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada audiens umum. Media massa adalah sarana yang dipakai oleh sumber untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.

Kemajuan teknologi saat ini berpengaruh besar terhadap peran media massa. Kebebasan media dan dukungan teknologi dapat memberikan dua dampak yang berbeda. Di satu sisi, ketika masyarakat memiliki akses mudah ke informasi, regulasi pemerintah dapat menciptakan kondisi demokrasi. Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga dapat menyebabkan masalah yang tidak terkontrol dan menghasilkan hubungan yang sangat

kompleks. Teknologi ini memungkinkan terjadinya koneksi secara luas. Fenomena ini, yang melibatkan pertumbuhan hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, disebut globalisasi. Media dianggap sebagai alat yang mempercepat proses ini dan menghapus batasan.

Media massa dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak meliputi koran, majalah, dan tabloid, sementara media elektronik mencakup televisi, radio, dan internet. Setiap jenis media massa memiliki karakteristik uniknya sendiri, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan dan sifat khasnya. Keunggulan dari media massa, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, terletak pada kemampuannya untuk mencakup audiens yang luas. Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat mulai beralih ke media massa online. Pengertian Media Massa Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online.

Syamsul dan Romli (2012) dalam buku “Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online” mengartikan media online sebagai berikut, “Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet”. Masih menurut

Romli dalam buku tersebut, media online adalah media massa,” generasi ketiga” setelah media cetak (printed media) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (electronic media) –radio, televisi, dan film/video. Media Online merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online –disebut juga *cyber journalism* didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau “fisik”, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email.

2) Tujuan Media Massa Online

Efek media saat ini merujuk pada situasi di mana kebutuhan dipenuhi melalui penggunaan media sebagai sarana untuk mencapainya. Penggunaan media melibatkan berbagai hal, seperti berapa lama media digunakan, jenis konten multimedia yang dinikmati, dan berbagai interaksi antara individu konsumen media dengan konten multimedia atau media massa secara keseluruhan. Penggunaan dan pemenuhan kebutuhan media ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu pengetahuan, hiburan, kepentingan sosial, dan pelarian.

a. Pengetahuan

Individu menggunakan media massa untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Menurut survei, alasan orang menggunakan media massa meliputi keinginan untuk mengetahui kegiatan pemerintah, perkembangan dunia, dan aktivitas para politisi.

b. Hiburan

Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk hiburan, dan salah satu sumbernya adalah media massa. Hiburan bisa diperoleh melalui beberapa cara, termasuk pencarian stimulasi untuk mengatasi kebosanan atau melarikan diri dari rutinitas, mencari relaksasi untuk menghindari tekanan dan masalah, dan melepaskan emosi yang tertahan.

c. Kepentingan Sosial

Kebutuhan ini terpenuhi melalui pembicaraan atau diskusi tentang program televisi, film terbaru, atau acara siaran terbaru. Konten media menjadi topik pembicaraan yang ramai, memberikan dasar yang sama untuk membicarakan masalah sosial. Dengan demikian, media juga berperan memperkuat hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat.

d. Pelarian

Individu tidak hanya menggunakan media sebagai cara untuk bersantai, tetapi juga sebagai bentuk pelarian dari aktivitas lainnya. Media massa digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban lain.

G. Definisi Konsepsional

Menurut Koesnaedi (2014) mengungkapkan bahwa definisi konsepsional merujuk pada metode yang digunakan untuk menjelaskan pembatasan pengertian antara satu konsep dan konsep lainnya. Sementara itu, konsep diartikan sebagai abstraksi dari suatu fenomena yang diformulasikan berdasarkan generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini dilakukan agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam penulisan. Dalam konteks tulisan ini, definisi konseptual dapat dijelaskan sebagai;

1. Politik Identitas

Politik identitas dapat dijelaskan sebagai bentuk politik yang muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan politik yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Pola pikir kultural, terutama yang bersifat tradisional dan daerah, menjadi landasan bagi kelompok tersebut untuk memandang atau memperhatikan politik sebagai bentuk partisipasi yang berpotensi menjadi kekuatan politik.

2. Ruang Publik (Public Sphere)

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli mengenai definisi ruang public, dapat terlihat bahwa definisi ruang public secara umum telah mengalami perluasan makna, yakni suatu ruang yang ditujukan untuk

public atau khalayak ramai secara umum. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang public merupakan tempat dimana seseorang berkumpul, berinteraksi, dan berbagi mengenai beragam topik tertentu dengan orang lain atau asing secara bebas tanpa ada tekanan dan larangan dari pihak manapun.

3. Pemilu

Pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dari kepentingan rakyat. Sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun material.

5. Media Massa Online

Media Massa Online merupakan segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan pengukuran suatu variabel, mencapai tujuan penelitian. Melalui definisi operasional akan ditentukan gejala dan indikator variabel dan bagaimana mengukur gejala atau indikator tersebut.

Awal mula terbentuknya politik identitas dalam lingkup politik nasional menjelang Pemilu Presiden 2024 merupakan dasar dari penelitian ini. Berdasarkan kerangka teori diatas, terdapat definisi operasional untuk mengetahui politik identitas dalam lingkup politik nasional menjelang Pemilu Presiden 2024 yaitu:

Tabel 1. 1 Model Konstruksi Identitas

Variable	Indikator	Parameter
Politik Identitas	Identitas Legitimasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dominasi atas pendekatan tertentu terhadap suatu kelompok melalui nilai budaya atau kepercayaan.2. Penawaran untuk memberikan kesejahteraan kepada pemilih.
	Identitas Resistensi	<ol style="list-style-type: none">1. Provokasi secara sikap maupun komunikasi kepada pihak yang dianggap bukan loyalis terhadap kelompok tertentu.2. Proses agenda setting untuk membentuk opini masyarakat oleh actor politik yang menguntungkan posisi mereka.
	Identitas Proyek	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan/penciptaan identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat melalui

Variable	Indikator	Parameter
		perubahan sosial, contohnya, hak minoritas, gender, dll. 2. Pembentukan/penciptaan identitas baru melalui partisipasi aktif dalam jaringan online dan memperoleh dukungan dari komunitas virtual.

I. Alur Pikir Penelitian

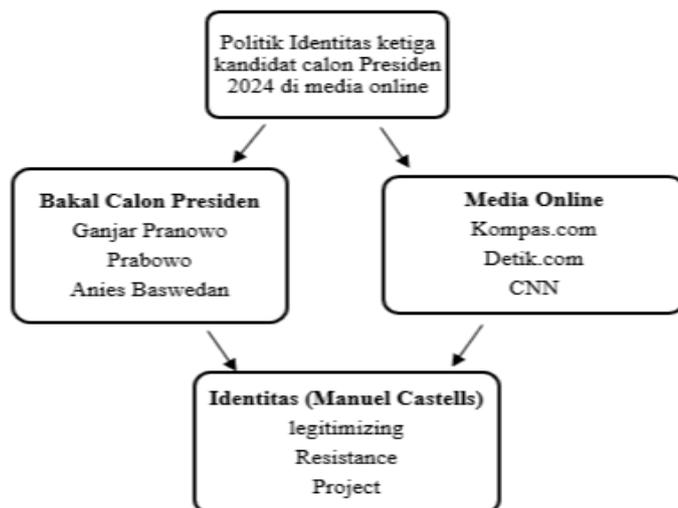
Pemilu merupakan kegiatan yang sangat ditunggu tunggu oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pemilu yang menentukan pemimpin sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat dengan kata lain bisa menentukan nasib negara.

Sejarah pemilu yang Panjang menjadikan kontestasi ini terkadang dalam pelaksanaan politiknya diwarnai dengan praktik politik yang menghalalkan segala cara, mulai dari penggunaan politik identitas untuk meraih kemenangan. Berjalannya pemilu sampai saat ini yang telah diselenggarakan secara seretak bertujuan agar pemilu yang dilaksanakan lebih efisien waktu dan finansial.

Dalam situasi kontestasi menjelang Pemilu Presiden 2024 merupakan hasil dari polarisasi politik yang tajam dan politisasi masalah identitas selama pemilihan presiden 2019. Dengan kata lain, ada semacam dinamika polarisasi dan kontestasi yang terus berlangsung. Desain pemilihan yang menetapkan batas presidential juga meningkatkan polarisasi politik karena hanya ada dua peluang untuk muncul sebagai kandidat presiden. Selain itu, terdapat fenomena yang terjadi dalam industri konsultan politik, pengaruh eksternal, dan orang-orang yang terlibat dalam kampanye online paslon. Selain memainkan peran penting dalam menentukan

produksi isu dan menyebarkan konten kampanye di platform digital, fungsi mereka juga menyebabkan perpecahan politik dan politisasi masalah identitas. Pergerakan media Online yang sangat masif di era globalisasi dan keterbukaan informasi menjadikan dampak dari media Online sekarang menjadi besar. Pengkajian media Online yang merujuk dari dua nama besar yaitu Kompas.com, Detik.com, dan CNN. Kerangka berpikir dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian



J. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian adalah sesuatu proses seseorang dalam memahami fenomenal tertentu kemudian dikembangkan menjadi ide, teori, dan konsep. Teknik penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dalam melakukan

penelitian ini. Selanjutnya, dianalisis menggunakan 49ndica deskriptif analisis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memeriksa, mengetahui, mendeskripsikan, menjelaskan, serta menemukan kualitas serta karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diketahui, dan dideskripsikan melalui penelitian kuantitatif(Saryono, 2010). Sedangkan 49ndica deskriptif analisis merupakan upaya untuk mendeskripsikan peristiwa terkini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh peneliti sesuai data dan apa adanya (Moleong, 2000).

2. Data dan sumber data

1) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber kedua atau dari berbagai sumber lainnya, termasuk bacaan dan berbagai sumber data. Jenis data sekunder meliputi berita, majalah, 49ndicato, serta publikasi dari organisasi atau 49ndicat terkait. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari 3 sumber berita di internet. Yaitu, Detik, Kompas, dan CNN.

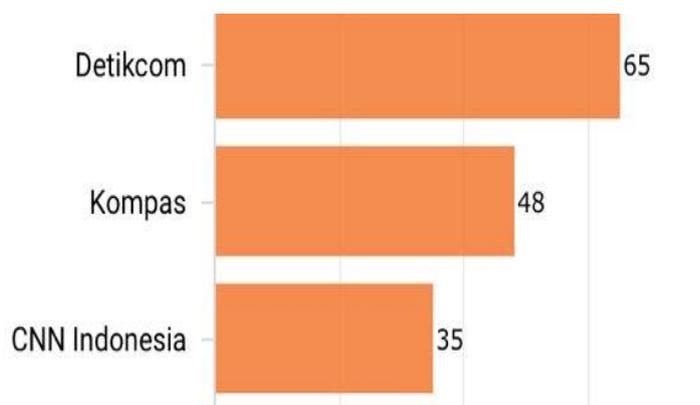
3. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian 49ndicat bisa berupa buku, arsip, dan artikel. Dokumentasi yang akan diambil dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dari 3 sumber berita, yaitu Detik.com, Kompas.com, dan CNN. Alasan mengambil 3 sumber berita tersebut karena ketiga sumber berita

tersebut paling banyak dilihat oleh masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan databoks.com, Detikcom menjadi media daring dengan konsumsi terbesar. Sebanyak 65% responden mengaku membaca Detikcom setidaknya sekali dalam seminggu. Persentase ini jauh mengungguli Kompas online yang sebesar 48%. Posisi ketiga ditempati CNN Indonesia dengan persentase 35%. Sebagai informasi, Detikcom dan CNN sama-sama dimiliki oleh CT Corp.

Gambar 1.2 Presentase penggunaan media massa online



Sumber: databoks.com

4. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu Qualitative Data Analysis Software (Q-DAS) dengan spesifik menggunakan Aplikasi Nvivo 12Plus dengan hanya menggunakan *tools crosstab*. *Crosstab* digunakan untuk mengetahui tabulasi silang dari data yang telah diamati. Penggunaan analisis Nvivo 12Plus digunakan untuk mempermudah menggambarkan dan menarasikan data yang telah diolah. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menarasikan dan

mendesripsikan hasil analisis yang telah diolah sebelumnya. Tahapan analisis data yang ada dalam penelitian ini adalah:

1) Pengumpulan data

Pada tahap ini, data berita yang ada dikumpulkan dengan mengacu pada topik yang diteliti, yaitu Politik Identitas Dalam Pemilu: Maraknya Politik Identitas Dalam Lingkup Politik Nasional menjelang Pemilu Presiden 2024.

2) Pemfilteran data

Pada tahapan ini bertujuan menyaring data yang masuk dari 3 sumber data berita yaitu, Detik, Kompas, dan CNN. Tahapan filtering data menjadi tahapan keda dalam menganalisis data yang ada.

3) Pengkodean data

Pada tahapan ini data yang ada dianalisis dengan menggunakan 51 indicator tertentu yang disebut nodes untuk di analisis dengan mengkaitkan dengan teori yang digunakan.

4) Penyajian data

Pada tahapan ini data yang telah dianalisis diberikan narasi dan dikaitkan dengan teori serta dikembangkan menjadi data yang sempurna.